

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, JUMLAH UANG BEREDAR,
NILAI TUKAR RUPIAH, UTANG PEMERINTAH, PENGELUARAN
PEMERINTAH, HARGA MINYAK DUNIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP INFLASI DI INDONESIA PERIODE 2006-2020**

**Nana Mei Listyaningrum; Yuni Prihadi
Utomo,S.E.,M.M
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi Pembangunan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Inflasi adalah fenomena naiknya tingkat harga secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia, Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar Rupiah, Utang Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah, Harga Minyak Dunia dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2006-2020. Penelitian ini menggunakan data time series dengan alat analisis regresi *Ordinary Least Squares* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan Kurs dan Harga Minyak Dunia berpengaruh positif terhadap Inflasi., sementara variabel Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia, Jumlah Uang Beredar, Utang Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh. Kondisi ini memperlihatkan inflasi Indonesia yang rentan terhadap gejolak nilai mata uang asing khususnya US\$ dan harga minyak dunia. Inflasi di Indonesia juga tidak bersifat moneter, tetapi lebih dikarenakan adanya ketidaksempurnaan pasar seperti monopoli, oligopoli dan monopsoni. Perekonomian Indonesia selama masa yang diteliti tampak belum mencapai *full employment*, sehingga adanya kenaikan permintaan agregat tidak memicu terjadinya Inflasi.pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan Nilai Tukar Rupiah dengan memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM, mengupayakan tercapainya kondisi *full employment* dan mengatur para pelaku pasar agar tidak memainkan harga pada saat masyarakat membutuhkan

Kata Kunci: Inflasi, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar Rupiah, Utang Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah, Harga Minyak Dunia, Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract

Inflation is the phenomenon of rising price levels in general. This research aims to measure the direction and magnitude of the influence of Bank Indonesia Interest Rates, Money Supply, Rupiah Exchange Rate, Government Debt, Government Expenditures, World Oil Prices and Economic Growth on Inflation in Indonesia in 2006-2020. This research uses time series data with Ordinary Least Squares (OLS) regression analysis tools. This research result show that the Rupiah Exchange Rate and World Oil Prices have a positive effect on Inflation. Meanwhile, the Bank Indonesia Interest Rate, Money Supply, Government Debt, Government Expenditure and Economic Growth variables have no effect. This condition show that Indonesian inflation is vulnerable to fluctuations in the value foreign currencies, especially the UUS\$ and world oil prices. Inflation in Indonesia is also not monetary, but rather due to market imperfection such as monopoly, oligopoly and monopsony. During the period studied, it appears that the Indonesian economy has not yet reached full employment, so that increase in aggregate demand does not trigger inflation. The government is expected to be able to maintain the stability of the Rupiah Exchange Rate by strengthening supervision over fuel distribution, striving to

achieve full employment conditions and regulating market players so as not to do manipulate prices when people need these goods

Keywords: *inflation, Interest Rate, Money Supply, Rupiah Exchange Rate, Government Debt, Government Expenditures, World Oil Prices, Economic Growth*

1. PENDAHULUAN

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes adalah bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, akibatnya akan terjadi inflationary gap. (Agusmianata et al., 2018)

Menurut Putong dalam Fadilla & Purnamasari, inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. (Fadilla & Purnamasari, 2021)

Menurut Boediono dalam Fadilla & Purnamasari, inflasi merupakan suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga-harga barang lain. (Fadilla & Purnamasari, 2021)

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) merupakan gambaran perkembangan harga pada level pedagang besar (grosir). Perkembangan harga yang dicakup adalah perkembangan harga pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pada level nasional.

Penyebab terjadinya inflasi diantaranya yang pertama adalah demand full inflation, yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan agregat demand terhadap komoditi-komoditi hasil produksi pasar barang. Faktor kedua adalah penawaran atau cost push inflation yang dikarenakan bergesernya aggregate demand supply curve ke arah kiri atas yang disebabkan oleh meningkatkan harga faktor-faktor produksi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditi. (Atmadja, 1999)

Inflasi memiliki berbagai macam dampak bagi perekonomian suatu negara, baik dampak positif maupun dampak negatif akan tetapi seringkali lebih banyak menimbulkan dampak negatifnya. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan oleh inflasi seperti kenaikan output perekonomian akibat kenaikan harga direspon positif oleh produsen. Dampak negatif pada perekonomian diantaranya mengurangi kegairahan penanam modal, tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperburuk distribusi pendapatan dan mengurangi daya beli masyarakat (Sutawijaya, 2012), Pergerakan inflasi di Indonesia pada tahun 2000 hingga tahun 2020 tersaji pada Grafik 1.

Grafik 1
Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2006-2020



Sumber: Bank Indonesia, 2021(diolah)

Grafik 1 memperlihatkan bahwa inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Selama periode tahun 2006 hingga tahun 2014 tingkat inflasi di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Tingkat inflasi yang paling tinggi yaitu pada tahun 2008 yaitu sebesar 11,06% lalu pada tahun 2020 merupakan tingkat inflasi terendah yaitu 1,68% atau berada pada kisaran target BI yaitu sebesar 3,5%. IHK yang rendah ini tidak terlepas dari perlambatan permintaan domestik akibat pandemi Covid-19.

Menurut Boediono, teori kuantitas merupakan teori yang menganggap bahwa penyebab terjadinya inflasi hanya disebabkan oleh satu faktor saja, yaitu jumlah uang beredar. Tingginya jumlah uang beredar yang ada di masyarakat dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik. Konsep dasar dari teori kuantitas: (1) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang beredar (penambahan uang kartal atau giral) tanpa disertai perubahan yang signifikan dalam jumlah produksi barang. (2) Laju inflasi juga ditentukan oleh ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga-harga barang dimasa mendatang. (Hadi, 2016)

Keynes menyatakan inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya (*disposable income*). Hal tersebut digambarkan dalam suatu kondisi dimana permintaan masyarakat akan barang melebihi jumlah barang yang tersedia, sehingga muncul *inflationary gap*. *Inflationary gap* ini muncul karena masyarakat berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan efektif akan barang-barang. Inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan oleh masyarakat. Inflasi baru akan berhenti apabila permintaan efektif total tidak melebihi harga-harga yang berlaku jumlah output tersedia. (Atmadja, 1999)

Boediono menyatakan, teori strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas

pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*inflexibilities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Menurut teori ini, ada dua ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi: (1) Ketegaran pertama berupa “ketidakelastisan” dari penerima ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor lain. (2) Ketegaran kedua berkaitan dengan “ketidakelastisan” dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri. (Hadi, 2016)

Berdasarkan latar belakang di muka, penelitian ini akan mengamati pengaruh tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah, utang pemerintah, pengeluaran pemerintah, harga minyak dunia dan pertumbuhan ekonomi terhadap Inflasi di Indonesia periode 2006 hingga 2020.

Martanto *et al.* (2021), dengan analisis regresi *Error Correction Model* (ECM), tahun 1998-2020, menemukan bahwa dalam jangka pendek Nilai Tukar Rupiah (Kurs) berpengaruh terhadap variabel Inflasi (INF), dengan koefisien regresi sebesar -2,1612, serta signifikansi empirik t sebesar 0,0462 ($< 0,05$). Dalam jangka panjang menemukan variabel Nilai Tukar Rupiah (Kurs) berpengaruh terhadap variabel Inflasi (INF) dengan koefisien regresi 1,9425, serta signifikansi empirik t sebesar 0,0679 ($< 0,10$)

Anggraeni & Dwiputri (2022), dengan analisis regresi ECM, tahun 2010- 2020, menemukan dalam jangka pendek Nilai Tukar Rupiah (Kurs) berpengaruh terhadap Inflasi (INF) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,1903, serta signifikansi empirik t sebesar 0,0478 ($< 0,05$). Sedangkan variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) tidak berpengaruh terhadap variabel Inflasi (INF) di Indonesia dengan signifikansi empirik t sebesar 0,8999 ($> 0,10$). Dalam jangka panjang ditemukan variabel Nilai Tukar Rupiah (Kurs) dan Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh terhadap variabel Inflasi (INF) di Indonesia, dengan koefisien regresi sebesar 0,2835 dan 2,0520, serta signifikansi empirik t masing-masing sebesar 0,0004 ($< 0,05$) dan 0,0044 ($< 0,05$).

Aimola & Odhiambo (2021), menggunakan analisis regresi ECM, tahun 1983-2019, dalam jangka pendek menemukan Jumlah Uang Beredar (JUB) dan Hutang Pemerintah (HP) berpengaruh terhadap variabel Inflasi (INF) di Ghana dengan masing-masing koefisien regresi sebesar -4,1726 dan 2,3101, serta signifikansi empirik t masing-masing sebesar 0,0003 ($< 0,05$) dan 0,0294 ($< 0,05$). Dalam jangka panjang ditemukan Hutang Pemerintah (HP) berpengaruh terhadap variabel Inflasi (INF) di Ghana, dengan koefisien regresi sebesar 1,9294, serta signifikansi empirik t sebesar 0,0651 ($< 0,10$). Sedangkan variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) tidak berpengaruh terhadap variabel Inflasi (INF) di Ghana dengan signifikansi empirik t sebesar 0,2506 ($> 0,10$).

Nasir *et al.* (2021), dengan analisis regresi ECM, tahun 1987- 2019, dalam jangka pendek menemukan Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh terhadap variabel Inflasi (INF) di Pakistan

dengan koefisien regresi sebesar 1,2259, serta signifikansi empirik t sebesar 0.0000 ($< 0,05$). Dalam jangka panjang menemukan Jumlah Uang Beredar (JUB) tidak berpengaruh terhadap variabel Inflasi (INF) di Pakistan dengan signifikansi empirik t sebesar 0.794 ($> 0,10$).

Nguyen (2015), dengan analisis regresi ECM, tahun 1985- 2012, dalam jangka pendek menemukan Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh terhadap variabel Inflasi (INF) di Asia, dengan koefisien regresi sebesar -0,3611, serta signifikansi empirik t sebesar 0.001 ($< 0,05$). Dalam jangka panjang menemukan Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh terhadap variabel Inflasi (INF), dengan koefisien regresi sebesar 0,0265, serta signifikansi empirik t sebesar 0,082 ($< 0,10$).

Aprileven (2015), selama tahun 2006-2012 dengan analisis regresi *Path Analysis*, dalam path kedua menemukan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia, dengan koefisien regresi sebesar 12,926, serta signifikansi empirik t sebesar 0,000 ($< 0,05$).

Apriansyah & Amaliah (2023) , selama tahun 1990-2021 dengan analisis regresi OLS menemukan Jumlah Uang Beredar berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 3,838, serta signifikansi empirik t sebesar 0,001 ($< 0,05$).

Selama periode 2000 hingga periode 2019, dengan analisis regresi OLS, Rando *et al.* (2021), menemukan bahwa Suku Bunga Bank Indonesia (*BIRATE*) berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 2,8788, serta signifikansi empirik t sebesar 0,0115 ($< 0,05$). Sedangkan Pengeluaran Pemerintah (PP) dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) tidak berpengaruh terhadap inflasi dengan signifikansi empirik t masing-masing sebesar 0,1593 ($> 0,10$) dan 0,980 ($> 0,10$).

Selama periode 1996 hingga periode 2018, dengan analisis regresi OLS, Sriwahyuni *et al.* (2020), menemukan bahwa Jumlah Uang Beredar (JUB) tidak berpengaruh terhadap inflasi di Sumatra Utara dengan signifikansi empirik t sebesar 0,080 ($> 0,10$).

Selama periode 2011 hingga periode 2018, dengan analisis regresi OLS, Susmiati *et al.* (2021), menemukan bahwa Nilai Tukar Rupiah (Kurs) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dengan signifikansi empirik t sebesar 0,6474 ($> 0,10$).

Selama periode 2004 hingga periode 2009, dengan analisis regresi OLS, Perlambang (2017), menemukan bahwa Jumlah Uang beredar (JUB) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar -3,750, serta signifikansi empirik t sebesar -0,001 ($< 0,05$).

Selama periode 2001 hingga periode 2015, dengan analisis regresi OLS, Dabukke *et al.* (2017), menemukan bahwa Harga Minyak Dunia (WTI) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 2,363, serta signifikansi empirik t sebesar 0,036 ($< 0,10$).

Selama Periode 2006 hingga 2012, menggunakan analisis regresi OLS, Deviana (2014), menemukan bahwa Suku Bunga Bank Indonesia (*BIRATE*) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar -11,059, serta signifikansi empirik t sebesar 0,0000 ($< 0,01$).

Sedangkan variabel Nilai Tukar Rupiah (Kurs) tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dengan signifikansi empirik t sebesar 0,3249 ($> 0,10$).

Selama Periode 1997 hingga 2020, dengan analisis regresi OLS, Nugroho & Utomo (2022), menemukan bahwa Pengeluaran Pemerintah (PP) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 17,2148, serta signifikansi empirik t sebesar 0,0009 ($< 0,01$). Sedangkan BIRATE tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dengan signifikansi empirik t sebesar 0,6977 ($> 0,10$).

Sutawijaya (2012), selama tahun 1985-2015, dengan analisis regresi OLS, menemukan Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia dengan koefisien regresi 0,0058 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,026 ($< 0,05$).

Sipayung & Budhi, (2013), selama tahun 1993-2012, dengan analisis regresi OLS, menemukan Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia dengan koefisien regresi 1,193 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,250 ($> 0,05$).

Selama periode 2015 hingga periode 2020, menggunakan analisis WarpPLS, Amaliyah & Aryanto (2022), menemukan bahwa Nilai Tukar Rupiah (Kurs) tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dengan signifikansi empirik t sebesar 0,085 ($> 0,05$).

Selama periode 2009 hingga periode 2019, dengan menggunakan analisis regresi data Panel, Adekantari *et al.* (2022), menemukan bahwa Kurs tidak berpengaruh terhadap inflasi di 5 negara ASEAN di antaranya adalah Indonesia, Thailand, Philipina, Malaysia dan Singapura dengan signifikansi empirik t sebesar 0,5410 ($> 0,10$).

Selama periode 2016 hingga periode 2020, dengan menggunakan analisis regresi data Panel, Lestari *et al.* (2022), menemukan bahwa Pengeluaran Pemerintah (PP) tidak berpengaruh terhadap inflasi di Sumatera Utara dengan signifikansi empirik t sebesar 0,4061 ($> 0,10$).

Selama Periode 1998 hingga 2018, menggunakan analisis *Vector Autogression* (VAR), Purnomo *et al.* (2020), menemukan bahwa Harga Minyak Dunia (WTI) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dengan koefisien regresi masing-masing sebesar -3,7794 dan 0,0190, serta signifikansi empirik t masing-masing sebesar 0,0085 ($< 0,05$) dan 0,0000 ($< 0,05$).

Selama periode 2006 hingga 2014, menggunakan analisis VAR, Fauziyah & Cahyono (2014), menemukan bahwa BI Rate tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dengan signifikansi empirik t sebesar 0,9330 ($> 0,10$).

2. METODE

Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi Ordinary Least Squares (OLS) dengan model ekonometrik (estimator) sebagai berikut:

$$INF_t = \beta_0 + \beta_1 \ln(JUB_t) + \beta_2 BIRATE_t + \beta_3 \ln(KURS_t) + \beta_4 PE_t + \beta_5 \ln(PP_t) + \beta_6 \ln(WTI_t) + \beta_7 \ln(HP_t) + \varepsilon_t$$

di mana:

<i>INF</i>	= Inflasi (%)
<i>JUB</i>	= Jumlah Uang Beredar (M2) (miliar rupiah)
<i>BIRATE</i>	= Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (%)
<i>KURS</i>	= Nilai Tukar Rupiah (rupiah)
<i>PE</i>	= Pertumbuhan Ekonomi (%)
<i>PP</i>	= Pengeluaran Pemerintah (miliar rupiah)
<i>WTI</i>	= Harga Minyak Dunia (US\$)
<i>HP</i>	= Utang Pemerintah (Miliar Rupiah)
ε	= <i>Error term</i> (faktor kesalahan)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_4$	= Koefisien regresi variabel independent
<i>t</i>	= tahun ke <i>t</i>

Model ekonometrik di atas merupakan modifikasi dari model Martanto et al. (2021), Aimola dan Odhiambo (2021), Rando *et al.*, (2021), Nugroho & Utomo (2022) dan Purnomo *et al.* (2020). Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Uang Beredar, Utang Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah, Harga Minyak Dunia dan Pertumbuhan Ekonomi diduga memiliki pengaruh positif terhadap inflasi, sedangkan BI Rate berpengaruh negatif terhadap Inflasi.

Data penelitian yang dipakai adalah data *time series* dari tahun 2006-2020, diperoleh dari *World Bank* dan BPS. Data yang digunakan meliputi inflasi (INF), jumlah uang beredar (JUB), Tingkat suku Bunga Bank Indonesia (BIRATE), Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pengeluaran Pemerintah (PP), Harga Minyak Dunia (WTI) dan Utang Pemerintah (HP).

Tahap estimasi model ekonometrik di muka akan meliputi: tahap estimasi parameter model ekonometrik; uji asumsi klasik, yang meliputi Uji Multikolinieritas, Uji Normalitas Residual, Uji Otokorelasi, Uji Heterokedasitas, Uji Linieritas dan Uji Spesifikasi Model; Uji Keباikan Model, yang meliputi Uji Eksistensi Model dan interpretasi koefisiensi Determinan (R^2); dan diakhiri dengan Uji Validitas Pengaruh (uji *t*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model ekonometrik di atas beserta uji pelengkapanya terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Estimasi Model Ekonometrik

$INF_t = -133,4531 + 0,1624 BIRATE_t - 9,4190 \ln(HP_t) + 6,0559 \ln(JUB_t)$			
(0,1132)	(0,8012)	(0,5246)	(0,6871)
$+ 13,8403 \ln(KURS_t) + 0,0516 PE_t - 4,6569 \ln(PP_t) + 8,3209 \ln(WTI_t)$			
(0,0554) ^{***}	(0,9558)	(0,7262)	(0,0605) ^{***}
$R^2 = 0,8561$; DW-Stat. = 5,9480; F-Stat. = 16,9400; Prob. F-Stat. = 0,0157			
Uji Diagnosis			
(1) Multikolinieritas (VIF)			
$BIRATE = 6,6151$; $\ln(HP) = 181,4321$; $\ln(JUB) = 315,8083$; $\ln(KURS) = 8,7697$; $PE = 3,8753$; $\ln(PP) = 191,4698$; $\ln(WTI) = 6,5990$			
(2) Normalitas Residual			
JB(2) = 0,0360; Prob. JB(2) = 0,9821			
(3) Otokorelasi			
$\chi^2(2) = 4,7285$; Prob. $\chi^2(2) = 0,0940$			
(4) Heterokedastisitas			
$\chi^2(7) = 10,3227$; Prob. $\chi^2(7) = 0,1710$			
(5) Linieritas			
F(2, 5) = 1,3631; Prob. F(2, 5) = 0,3379			

Sumber: BPS, diolah. **Keterangan:** *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$. Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik (*p value*) statistik t.

Uji diagnosis memperlihatkan model terestimasi memiliki masalah multikolinieritas pada variabel Utang Pemerintah, Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran Pemerintah karena ketiga variabel ini memiliki nilai VIF > 10 (181,4321, 315,8083 dan 191,4698). Model terestimasi memiliki residual normal dengan nilai Prob. JB sebesar 0,9821 (> 0,10), tidak mengalami otokorelasi dengan nilai Prob. $\chi^2(2)$ sebesar 0,0940 (> 0,05), tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dengan nilai $\chi^2(7)$ sebesar 10,3227 (> 0,10), dan memiliki spesifikasi model linier atau tepat dengan nilai Prob. F(2, 5) sebesar 0,3379 (> 0,10).

Statistik kebaikan model (*goodness of fit*) memperlihatkan bahwa model eksis, terlihat dari probabilitas empirik statistik F, yang memiliki nilai 0,015682 (< 0,05), dengan R^2 atau daya ramal cukup tinggi, yakni sebesar 0,8561. Artinya, 85,61% variabel independen Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (*BIRATE*), Hutang Pemerintah (*HP*), Jumlah Uang Beredar (*JUB*), Nilai Tukar Rupiah (*KURS*), Pertumbuhan Ekonomi (*PE*), Pengeluaran Pemerintah (*PP*) dan Harga Minyak Dunia (*WTI*). Sisanya 14,39% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Secara terpisah, hanya variabel Nilai Tukar Rupiah (*Kurs*) dan Harga Minyak Dunia (*WTI*) yang memiliki pengaruh terhadap Inflasi, masing-masing dengan probabilitas empirik t sebesar

0,0554 ($< 0,10$) dan 0,0605 ($< 0,10$). Variabel Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BIRATE), Utang Pemerintah (HP), Jumlah Uang Beredar (JUB), Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Pengeluaran Pemerintah (PP) tidak berpengaruh terhadap Inflasi, karena memiliki probabilitas empirik masing-masing sebesar 0,8012 ($> 0,10$), 0,5246 ($> 0,10$), 0,6871 ($> 0,10$), 0,9558 ($> 0,10$) dan 0,7262 ($> 0,10$).

Variabel Nilai Tukar Rupiah memiliki koefisiensi regresi sebesar 13,8403. Pola hubungan antara Kurs dan Inflasi adalah linier-logaritma (lin-log), sehingga apabila Kurs naik sebesar 1% maka Inflasi akan naik sebesar $13,8403/100 = 0,1384\%$. Sebaliknya, apabila kurs turun sebesar 1% maka Inflasi akan turun sebesar 0,1384%.

Variabel Harga Minyak Dunia memiliki koefisiensi regresi sebesar 8,3209. Pola hubungan antara Harga Minyak Dunia dan Inflasi adalah linier-logaritma (lin-log), artinya apabila Harga Minyak Dunia naik 1% maka Inflasi juga akan naik sebesar $8,3209/100 = 0,0832\%$. Sebaliknya apabila Harga Minyak Dunia turun 1% maka Inflasi juga akan turun sebesar 0,0832%.

Inflasi, selama periode 2006-2020, ternyata dipengaruhi oleh Kurs dan Harga Minyak Dunia. sementara Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia, Utang Pemerintah, Jumlah Uang Beredar, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan.

Kurs memiliki pengaruh positif terhadap Inflasi memperlihatkan bahwa jika Kurs mengalami kenaikan maka Inflasi akan naik. Hal ini dikarenakan apabila kurs naik maka akan mengakibatkan harga barang impor naik dan menyebabkan inflasi naik karena banyak faktor produksi yang berasal dari impor, misalnya alat-alat medis, plastik, mesin, kendaraan, alat elektronik. Apabila harga barang impor naik, maka menyebabkan persediaan barang yang berasal dari impor akan berkurang sehingga menyebabkan tidak seimbangnya permintaan dan penawaran barang sehingga menyebabkan inflasi. Hal ini juga diperkuat oleh fakta dan data bahwa kurs mengalami peningkatan sehingga inflasi juga meningkat. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Aprileven, (2015) dan Susmiati *et al.* (2021).

Harga Minyak Dunia memiliki pengaruh positif terhadap Inflasi. Hal ini disebabkan karena fluktuasi harga minyak dunia akan mendorong laju inflasi domestik. Kenaikan harga minyak dunia akan diikuti oleh naiknya harga produk-produk minyak, seperti bensin dan bahan bakar yang digunakan untuk proses produksi dalam perekonomian. Akibatnya, harga input meningkat yang kemudian akan direspon oleh perusahaan dengan peningkatan harga produk barang atau jasa akhir. Mahalnya harga BBM menyebabkan harga-harga barang ikut naik sehingga dapat menyebabkan inflasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Purnomo *et al.* (2020) dan Dabukke *et al.* (2017).

Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan BI rate tidak dapat mengubah perilaku perbankan dalam mengelola dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat baik dari perorangan maupun badan usaha. Selain itu, BI rate juga belum cukup untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga tidak menimbulkan perubahan pada sisi permintaan agregat demand, sehingga BI rate tidak menyebabkan terjadinya inflasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fauziah & Cahyono (2014).

Utang Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia. Utang pemerintah biasanya dialokasikan untuk beberapa sektor, tetapi keadaan utang pemerintah pada tahun penelitian tidak menyebabkan bertambahnya pendapatan negara, serta tidak menimbulkan meningkatnya permintaan agregat karena utang tersebut belum digunakan sebaik mungkin, sehingga utang pemerintah tidak memengaruhi tingkat Inflasi. Tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Aimola & Odhiambo (2021), yang menyatakan bahwa Utang Pemerintah berpengaruh terhadap Inflasi karena utang pemerintah menambah kekayaan rumah tangga sehingga permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkatkan tekanan harga.

Jumlah Uang Beredar tidak berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia. Inflasi di Indonesia tidak bersifat moneter tetapi dikarenakan ketidaksempurnaan pasar karena adanya beberapa faktor, misalnya (1) penjual tunggal atau perusahaan tunggal yang menguasai pasar dan tidak memiliki pesaing sehingga dapat mempermainkan harga (monopoli), (2) keadaan pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli tunggal (monopsoni) sehingga menyebabkan kondisi tawar menawar harga yang tidak sehat, (3) kondisi pasar dimana di dalamnya terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli, serta produk yang dijual bersifat homogen (oligopoli), dll. Sehingga karena jalur pemasaran yang kurang tepat sehingga pelaku ekonomi yang kuat dapat mengendalikan harga. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sriwahyuni *et al.* (2020), Aimola & Odhiambo, (2021) dan Perlambang, (2017).

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat Inflasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dikarenakan belum tercapainya *full employment*, karena masih banyak pengangguran, kurangnya kualitas SDM yang mumpuni, sehingga suatu sumber daya masih belum dimanfaatkan sepenuhnya dan mengakibatkan rendahnya permintaan agregat sehingga apabila ada permintaan agregat dapat ditangani tanpa menaikkan harga. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sipayung & Budhi (2012).

Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat Inflasi di Indonesia. Pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer terhadap masyarakat yang seharusnya dapat meningkatkan permintaan agregat atau juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi masih belum

cukup untuk menambah permintaan agregat. Hal ini juga dapat disebabkan karena permintaan agregat naik tetapi kondisi ekonomi yang masih belum *full employment*, dimana tenaga kerja belum dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga permintaan agregat ditangani tanpa menaikkan harga barang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lestari *et al.* (2022).

4. PENUTUP

Uji kebaikan model memperlihatkan bahwa model terestimasi eksis, dengan koefisien determinan R² sebesar 0,8561, artinya 85,61% variasi variabel Inflasi dapat dijelaskan oleh variabel Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia, Hutang Pemerintah, Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar Rupiah, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Harga Minyak Dunia. Sedangkan sisanya 14,39% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Berdasarkan uji validitas (uji t) ditemukan variabel Kurs dan Harga Minyak Dunia berpengaruh terhadap Inflasi, sedangkan variabel Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia, Jumlah Uang Beredar, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Utang Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Inflasi.

Inflasi di Indonesia ternyata lebih dipengaruhi oleh Kurs dollar dan Harga Minyak Dunia, sementara variabel Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia, Jumlah Uang Beredar, Utang Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap inflasi. Kondisi ini memperlihatkan inflasi Indonesia rentan terhadap gejolak mata uang asing yang dapat melemahkan mata uang Rupiah dan menyebabkan barang impor naik. Apabila barang impor naik, maka harga barang dan jasa domestik juga ikut naik. Selain itu, harga minyak dunia juga sangat memengaruhi inflasi Indonesia, karena Indonesia sudah menjadi negara yang harus mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM-nya. Karena BBM diperlukan untuk distribusi atau pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain, apabila harga BBM naik maka harga-barang barang akan ikut naik. Inflasi di Indonesia tidak bersifat moneter, tetapi lebih dikarenakan ketidaksempurnaan pasar karena terjadinya monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Perekonomian Indonesia tampaknya belum mencapai *full employment*, sehingga adanya kenaikan permintaan agregat tanpa menyebabkan inflasi.

Pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan Nilai Tukar Rupiah dengan memperkuat likuiditas pemerintah serta mendorong ekspor dan mengurangi impor. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap distribusi barang khususnya pada distribusi minyak mentah karena apabila subsidi BBM pemerintah rendah maka harga BBM akan naik, serta menentukan kebijakan tegas agar tidak ada penyalahgunaan maupun penimbun BBM karena dapat meningkatkan harga BBM. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan kondisi pasar dan mengatur para

pelaku ekonomi besar sehingga tidak ada yang menimbun barang dan memainkan harga Ketika masyarakat membutuhkan dan juga mengupayakan tercapainya full employment dimana berkurangnya jumlah pengangguran dan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya yang ada sehingga tingkat produksi meningkat dan dapat menaikkan permintaan agregat.

DAFTAR PUSTAKA (styleHeading Daftar Pustaka)

- Adekantari, P., & Amar, S. (2022). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Inflasi di ASEAN-5: (Indonesia, Thailand, Philipina, Malaysia dan Singapura). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(1), 55-63.
- Agusmianata, N., Militina, T., & Lestari, D. (2018). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Inflasi di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 19(2), 188-199.
- Aimola, A. U., & Odhiambo, N. M. (2021). Public Debt and Inflation: Empirical Evidence From Ghana. *Development Studies Research*, 8(1), 1–13.
- Amaliyah, F., & Aryanto, A. (2022). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga terhadap Inflasi di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1342–1349.
- Anggraeni, D., & Dwiputri, I. N. (2022). Variabel-variabel yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 119–128.
- Aprileven, H. P. (2017). Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Inflasi yang Dimediasi oleh Jumlah Uang Beredar. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 32–41.
- Apryansyah, R., & Amaliah, I. (2023). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode Tahun 1990-2021. *Jurnal Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(1), 71-78.
- Atmadja, A. S. (1999). Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber Penyebab dan Pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 55-66.
- Dabukke, A. T., Maulida, Y., & Indrawati, T. (2017). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) dan Harga Minyak Dunia terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal JOM Fekom*, 4(1), 757-767.
- Deviana, N. (2014). Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Suku Bunga Kredit dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia Periode Tahun 2006-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 81–91.
- Fadilla, A. S., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 18-26.
- Fauziyah, W. E. N., & Cahyono, H. (2014). Pengaruh BI Rate dan Jumlah Uang Beredar terhadap

- Tingkat Inflasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3), 1-9.
- Hadi, S. S. (2016). Laju Inflasi Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia dan Cara Penanggulangannya. *Jurnal Perspektif*, 16(2), 86-95.
- Lestari, D., Nainggolan, P., & Damanik, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Inflasi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 27–36.
- Martanto, B., Tan, S., & Hidayat, M. S. (2021). Analisis Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 1998-2020. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 619–632.
- Nasir, R., Waheed, R., & Nasir, W. (2021). The Impact of Money Supply on Inflation in Pakistan. *Journal of Economics and Management Sciences*, 2(1), 15–26.
- Nguyen, V. B. (2015). Effects of Fiscal Deficit and Money M2 Supply on Inflation: Evidence From Selected Economies of Asia. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 20(38), 49–53.
- Nugroho, M. F., & Utomo, Y. P. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Masyarakat, Jumlah Uang Beredar, serta Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 1997-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 822-825.
- Perlambang, H. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar terhadap Tingkat Inflasi. *Media Ekonomi*, 19(2), 49–68.
- Purnomo, S. D., Istiqomah, I., & Badriah, L. S. (2020). Pengaruh Harga Minyak Dunia terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Profit Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 7(1), 13–24.
- Rando, S., Rotinsulu, D., & Rorong, I. (2021). Analisis Faktor-faktor Penentu Inflasi di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 7(1), 13-24.
- Sipayung, P. T. E., & Budhi, M. K. S. (2013). Pengaruh PDB, Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Indonesia Periode 1993-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(7), 334-343.
- Sriwahyuni, A., Nainggolan, P., & Sinurat, A. (2020). Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 61-71.
- Susmiati, S., Giri, N. P. R., & Senimantara, N. (2021). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2018. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 4(2), 68–74.
- Sutawijaya, A. (2012). Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), 85–101.